



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SMA NEGERI 3 SEMARANG**  
**PENILAIAN AKHIR SEMESTER TP. 2020/2021**



**LEMBARAN SOAL**

Mata Pelajaran : PPKn  
Kelas : X MIPA & Olimp  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 November 2020  
Waktu : 10.00 – 11.30 (90 menit)

---

**Pilih salah satu jawaban yang benar!**

1. Perhatikan data dibawah ini !

- (1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan
- (2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat
- (3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain
- (4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat

Berdasarkan data diatas yang merupakan implementasi dari nilai keadilan terdapat pada nomor adalah....

- A. 2 dan 4
- B. 1 dan 3
- C. 1 dan 4
- D. 1 dan 2
- E. 3 dan 4

2. Perhatikan rumusan dasar negara di bawah ini:

- 1. Peri Kebangsaan
- 2. Peri Kemanusiaan
- 3. Peri Ketuhanan
- 4. Peri Kerakyatan
- 5. Kesejahteraan Rakyat

Rumusan dasar negara tersebut diusulkan oleh ....

- A. Wachid Hasyim
- B. Ir. Soekarno
- C. Soepomo
- D. M. Yamin
- E. M. Hatta

3. Untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila. Atas dasar pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Kepres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Peristiwa yang berkaitan langsung dan menjadi dasar sejarah lahirnya Pancasila tersebut yaitu ....

- A. Pembentukan BPUPKI
- B. Dibentuknya Panitia Kecil
- C. Pidato M. Yamin di depan sidang BPUPKI
- D. Pidato Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI
- E. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu

4. Keterbukaan ideology Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga mampu memecahkan masalah-masalah terutama yang berkaitan dengan HAM, demokratisasi, dan pelaksanaan pembangunan nasional. Arti dari nilai-nilai dasar tersebut yaitu....

- A. Nilai yang harus disesuaikan dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat
- B. Merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, system, rencana, program, bahkan juga proyek proyek yang menindakkanjuti nilai Pancasila

- C. Nilai yang bersifat kontekstual yang merupakan arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu
  - D. Nilai yang bersifat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu, yang memiliki kebenaran
  - E. Nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan ( mengaktualisasikan ) nilai Pancasila
5. Montesquieu mengembangkan teori John Locke dengan memisahkan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Teori ini dinamakan ....
- A. The Principle of Separation of powers
  - B. Political representation
  - C. Control of Policy Making
  - D. Two Treaties of Government
  - E. Trias Politica
6. Perhatikan pernyataan dibawah ini !
- (1) Penyelenggaraan negara berada ditangan presiden
  - (2) Kabinet dibentuk oleh presiden
  - (3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen
  - (4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
- Pernyataan diatas merupakan ciri-ciri dari ....
- A. Bentuk negara kesatuan
  - B. Bentuk negara federasi
  - C. Bentuk pemerintahan republik
  - D. Sistem pemerintahan parlementer
  - E. Sistem pemerintahan presidensial
7. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pilihan berikut yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara horizontal adalah ....
- A. Kekuasaan kehakiman
  - B. Pemerintah pusat dan daerah
  - C. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
  - D. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
  - E. Kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
8. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan UUD NKRI Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal ....
- A. 20 ayat (1)
  - B. 20 ayat (2)
  - C. 20 ayat (3)
  - D. 20 ayat (4)
  - E. 20 ayat (5)
9. Perhatikan data berikut :
- (1) Menetapkan dan mengubah UUD.
  - (2) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
  - (3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden.
  - (4) Mengubah dan menetapkan UUD.
  - (5) Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
  - (6) Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden.
- Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan MPR setelah diadakannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ....
- A. 1, 2 dan 3

- B. 1, 5 dan 6
  - C. 2, 5 dan 6
  - D. 3, 4 dan 6
  - E. 4, 5 dan 6
10. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pilihan berikut yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu....
- A. Kekuasaan kehakiman
  - B. Pemerintah pusat dan daerah
  - C. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
  - D. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
  - E. Kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
11. Pembentukan Kementerian dilakukan oleh Presiden paling lama 14 hari kerja sejak mengucapkan sumpah atau janji presiden dan jumlah kementrian paling banyak 34. Alasan yang bukan merupakan dasar pembentukan kementrian tersebut adalah ....
- A. Efisiensi dan efektivitas
  - B. Perkembangan lingkungan global
  - C. Tantangan masyarakat Ekonomi ASEAN
  - D. Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas
  - E. Kestinambungan keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas
12. Pengaturan kekuasaan yang meliputi pembagian dan pemisahan kekuasaan agar sesuai dengan harapan rakyat diatur dalam UUD. Alasan pentingnya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam suatu Negara adalah ....
- A. Agar terjadi control dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan
  - B. Melaksanakan konsep kekuasaan modern yang diajarkan oleh Montesquieu dan John Locke.
  - C. Menghindari terjadinya kekosongan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan yang hanya dilakukan oleh satu lembaga
  - D. Menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan dan pengelolaan system pemerintahan yang dilakukan secara absolute atau otoriter
  - E. Menjaga keberlangsungan Negara agar dapat menjalankan fungsi menegakkan kedaulatan Negara dan mensejahterakan rakyat
13. Presiden dibantu oleh menteri menteri Negara dalam melaksanakan tugasnya. Tugas kementerian Negara Republik Indonesia yaitu :
- A. Mengkoordinasi para gubernur
  - B. Melaksanakan kekuasaan eksekutif
  - C. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan
  - D. Sebagai utusan presiden dalam menjelaskan program kepada DPR
  - E. Mendampingi presiden dalam kunjungan kenegaraan sebagai kepala pemerintahan
14. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep Negara kepulauan yang berciri Nusantara (*archipelagic state*) konsep itu kemudian diakui dalam konvensi hukum laut PBB tahun 1982, nama peraturan hukum internasional yang menganut konsep tersebut adalah....
- A. DUHAM
  - B. UNCLOS
  - C. KMB
  - D. GPS
  - E. ZEE
15. Nilai – nilai Pancasila sebagai ideology bersifat obyektif, artinya hakekat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal ( berlaku dimanapun), sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada Negara lain. Nilai nilai Pancasila bersifat subyektif maksudnya adalah....

- A. Nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, dan sebagainya.
  - B. Rumusan dari nilai Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal dan abstrak karena merupakan suatu nilai
  - C. Nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia yang punya hubungan baik dengan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai pencerminan adanya nilai-nilai tersebut
  - D. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah Negara yang mendasar sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
  - E. Nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia
16. Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.  
Lembaga pemerintah non kementerian bertanggung jawab kepada....
- A. Wakil menteri
  - B. Langsung kepada menteri coordinator
  - C. Presiden atau wakil presiden secara langsung
  - D. Menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan
  - E. Presiden melalui menteri/ pejabat setingkat menteri yang mengkoordinasikan
17. Selain bonus dari kemenpora, atlet pemenang medali emas di Asian Games juga menerima hadiah dari pemerintah daerah maupun pengusaha swasta. Hal itu termasuk mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan yaitu....
- A. Menghormati hak orang lain
  - B. Menghargai hasil karya orang lain
  - C. Memberi pertolongan kepada orang lain
  - D. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
  - E. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
18. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah *Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang*. Di bawah ini merupakan karakteristik wilayah nusantara yaitu....
- A. Indonesia menganut prinsip-prinsip Negara kepulauan
  - B. Kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau
  - C. Kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik saja
  - D. Pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai
  - E. Wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang
19. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
  - 2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
  - 3) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri
  - 4) Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai ijin dari Presiden
  - 5) Masuk dalam dinas Negara asing atas kemauan sendiri dan dorongan orang lain
  - 6) Menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
- Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 yang termasuk kehilangan kewarganegaraan ditunjukkan pada nomor....
- A. 1), 2), 3) dan 4)
  - B. 2), 3), 4) dan 5)
  - C. 1), 2), 3) dan 5)
  - D. 3), 4), 5) dan 6)

E. 1), 2), 5) dan 6)

20. Salah satu ciri system pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta adalah seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan dan keamanan Negara. Hal ini menunjukkan bahwa system pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat semesta dengan ciri....

- A. Kerakyatan
- B. Kesemestaan
- C. Kewilayahan
- D. Kenegaraan
- E. Kesatuan

21. Negara Indonesia mempunyai wilayah Negara dengan batas batas dan hak haknya ditetapkan dengan UUD dan UU. Adanya ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk....

- A. Penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia
- B. Memastikan batas perubahan batas geografis sebuah Negara
- C. Menegaskan secara konstitusional wilayah yang dapat di ekspansi
- D. Mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- E. Memaksakan kekuasaannya secara sah kepada semua orang yang ada diwilayahnya

22. Perhatikan pernyataan di bawah ini !

- 1) Menjadi tenaga sukarela di Negara lain
- 2) Mengamankan lingkungan sekitar
- 3) Membantu korban bencana
- 4) Mencegah bahaya narkoba
- 5) Mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok
- 6) Mengikuti wajib militer

Perwujudan bela Negara dapat ditunjukkan pada nomor....

- A. 1), 2), 3) dan 4)
- B. 1), 2), 3) dan 5)
- C. 2), 3), 4) dan 6)
- D. 2), 3), 4) dan 5)
- E. 3), 4), 5) dan 6)

23. Pelaksanaan pemilihan umum serentak diselenggarakan pada tanggal 16 April 2019.

Rakyat secara langsung akan memilih calon pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai bagian dari elemen kekuatan bangsa, maka sikap TNI dan POLRI dalam menghadapi kegiatan tersebut adalah....

- A. Menjadi penengah apabila terjadi sengketa dalam pemilihan
- B. Mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia
- C. Menjadi panitia pemilihan dan pengawas pemilihan agar berlangsung LUBER JURDIL
- D. Menggunakan hak pilih dan memilih karena situasi dan kondisi yang sudah memungkinkan
- E. Bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis

24. Perhatikan table berikut !

No	Sistem Parlementer	Sistem Presidensiil
1	Kabinet dapat dibubarkan oleh kepala negara	Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan
2	Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen	Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presiden
3	Kekuasaan eksekutif lebih kuat dari pada legislatif	Kekuasaan legislative lebih kuat dari pada eksekutif
4	Presiden sebagai symbol kekuasaan Negara atau kepala negara	Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan

5	Secara umum kekuasaan kepala pemerintahan dibatasi oleh waktu atau periodisasi	Kekuasaan presiden tidak dibatasi oleh waktu atau periodisasi
---	--	---

Berdasarkan table di atas yang merupakan perbedaan yang benar antara system parlementer dan sisten presidensiil ditunjukkan pada nomor....

- A. 1 dan 2
- B. 2 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 3 dan 4
- E. 4 dan 5

25. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di setiap provinsi yang akan dilaksanakan pada pemilu kada diikuti oleh beberapa pasangan calon. Para calon gubernur dan bupati diusung dan dicalonkan oleh beberapa kekuatan politik yang termasuk dalam infrastruktur politik yaitu....
- A. Partai politik
  - B. Tokoh politik
  - C. Media massa
  - D. Kelompok penekan
  - E. Kelompok kepentingan
26. Kebebasan pers yang bertanggung jawab merupakan salah satu ciri Negara demokratis. Peran media massa sebagai salah satu infrastruktur politik yaitu....
- A. Menghimpun sumber daya dan dana untuk membantu pembuatan keputusan
  - B. Memperjuangkan kepentingan anggota dan konstituen dalam pemilihan umum
  - C. Menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan legislative dengan informasi yang bijaksana
  - D. Sarana atau alat kominikasi massa dalam penyampaian informasi dan aspirasi masyarakat
  - E. Memperjuangkan keputusan politik seperti undang undang agar sesuai kepentingan politiknya
27. Perhatikan petikan bacaan berikut !
- Penghargaan kembali diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Gubernur inovatif, yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah sinoeng N Rachmadi mengatakan Gubernur menerima penghargaan sebagai gubernur inovatif dengan kategori transparansi layanan public. Menurutnya orang nomor satu di jawa tengah itu dinilai telah membuka lebar keterbukaan informasi dan transparansi di masa kepemimpnannya sejak menjabat 2013. “ Melalui keterbukaan informasi di semua kanal sisten informasi , baik SMS hingga media sosial, memudahkan warga untuk berkomunikasi dengan pemimpinnya dalam melaporkan kondisi suatu daerah, termasuk pertanyaan dan kritikan “, ujanya dalam rilis yang diterima *Semarangpedia.com* Jumat (12/8).
- Sinoeng menuturkan Ganjar dinilai mudah menyerap masukan dari masyarakat dan bertindak cepat karena mengelola sendiri akun *twitternya @ganjarpranowo*. Bahkan komitmen *clean government*-nya, juga mendapat apresiasi penghargaan dari KPK atas pengendalian korupsi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak pada 2015. (Dikutip dari laman <https://semarangpedia.com/ganjar-peroleh-penghargaan-gubernur-inovatif-2016/>, diakses pada 5/10/2016).
- Berdasarkan bacaan tersebut, Gubernur telah berusaha melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik yang bercirikan sebagai berikut, *kecuali*....
- A. Upaya membangun dominasi kekuasaan pemerintah yang kuat dalam berbagai aspek pembangunan di tengah dinamika masyarakat yang tinggi
  - B. Adanya komunikasi dan jaringan multisystem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas
  - C. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi

- D. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi
  - E. Keseimbangan kekuatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni dan kerja sama.
28. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan. Yang tidak termasuk persyaratan tersebut yaitu....
- A. Adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya
  - B. Adanya system informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi
  - C. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan yang mendukung tata pemerintahan yang baik
  - D. Mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sector public dengan mengurangi waktu dan hari kerja bagi pegawai
  - E. Terwujudnya akuntabilitas public, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan
29. Kekuasaan untuk membentuk undang –undang termasuk kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UU berada di tangan DPR. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan dalam konsep *Tria Politica* menurut Montesquieu yaitu kekuasaan....
- A. Legislative
  - B. Eksekutif
  - C. Yudikatif
  - D. Federative
  - E. Eksaminatif
30. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberikan kewenangan untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim dalam proses untuk memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak. Asas bebas artinya ....
- A. Berpihak pada kebenaran dan keadilan
  - B. Dapat menerima arahan dari berbagai pihak
  - C. Tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain
  - D. Sesuai dengan akal sehat dan hati nurani hakim
  - E. Dalam memutuskan perkara tidak dapat diwakilkan
31. Hakim agung merupakan hakim yang berada di lingkungan peradilan tingkat akhir Mahkamah Agung untuk memutuskan kasasi dan peninjauan kembali terhadap suatu kasusu hukum. Berikut adalah persyaratan menjadi hakim agung menurut UUD 1945 antara lain....
- A. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan berpengalaman sebagai anggota legislative
  - B. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum
  - C. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik, adi, professional, dan berpengalaman dalam memimpin sidang
  - D. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil akuntabel, dan berpengalaman di bidang keuangan
  - E. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jelas, professional, dan berpengalaman di bidang hukum
32. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang eksekutif melakukan kerja sama dengan DPR sebagai pelaksana kekuasaan legislative yang pengaturan dan

batasannya ditetapkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Contoh penerapan kerja sama tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia adalah....

- A. Membuat undang –undang dasar
- B. Memberikan grasi dan rehabilitasi
- C. Penyusunan undang undang dan APBN
- D. Menafsirkan isi undang undang dan member sanksi atas pelanggaran
- E. Mengangkat gubernur dan bupati/walikota diseluruh wilayah Indonesia

33. MPR berwenang memberhentikan presiden dalam masa jabatannya ( Pasal 3 ayat 3 UUD NRI 1945). Demikian juga DPR , selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3 UU NRI 1945). Menurut pasal tersebut, maka kekuasaan presiden tidak tak terbatas yang artinya....

- A. Presiden sebagai mandataris MPR
- B. MPR sebagai lembaga tertinggi Negara
- C. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh Undang-Undang
- D. Presiden bertanggung jawab kepada DPR dan MPR
- E. Kewenangan DPR – MPR di atas kekuasaan eksekutif

34. Untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia perlu ditetapkan hari lahir Pancasila. Atas dasar pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila.

Peristiwa yang berkaitan langsung dan menjadi dasar sejarah lahirnya Pancasila tersebut yaitu....

- A. Pembentukan BPUPKI untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul usul untuk dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia
- B. Pidati M. Yamin di depn sidang BPUPKI yang mengajukn lima usulan mengenai calon dasar Negara Indonesia
- C. Pidato Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI yang mengajukan usulan lima dasar Negara Indonesia Merdeka
- D. Dibentuknya Panitia Kecil untuk melanjutkan sidang dan merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar
- E. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia

35. Dalam konferensi hukum laut internasional di Janewa (Swiss) pada tahun 1958, Indonesia mengajukan konsep pengaturan laut wilayah. Konsep pengaturan laut wilayah yang di ajukan delegasi Indonesia berisi mengenai ....

- A. Konsepsi Archipelago dan batas laut territorial selebar 10 mil
- B. Konsepsi Archipelago dan yurisdiksi laut territorial selebar 200 mil
- C. Konsepsi negara kepulauan dan batas laut territorial selebar 12 mil
- D. Konsepsi Negara maritime dengan batas laut territorial selebar 200 mil
- E. Keutuhan wilayah NKRI

36. Negara berkewajiban memberi jaminan kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama. Adanya kewajiban tersebut memberikan penjelasan bahwa ...

- A. Negara membebaskan semua warga Negara dari rutinitas pekerjaan untuk selalu melakukan ibadah
- B. Warga Negara wajib menuntut pemerintah untuk memberikan hak menunaikan ajaran sesuai agama yang dianutnya
- C. Pemerintah membebaskan warga Negara untuk menjalankan ajaran agama selama tidak mengganggu praktek penyelenggaraan Negara
- D. Kewajiban pemerintah tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan semata tetapi memberikan jaminan hak atas kebutuhan warga Negara dalam menjalankan ajaran agama
- E. Penyelenggaraan Negara harus memperhatikan hak hak warga negara



37. Dalam konferensi hukum laut internasional di Janewa (Swiss) pada tahun 1958, Indonesia mengajukan konsep pengaturan laut wilayah. Konsep pengaturan laut wilayah yang diajukan delegasi Indonesia berisi mengenai ....
- A. Konsepsi archipelago dan batas laut territorial selebar 10 mil
  - B. Konsepsi archipelago dan yuridiksi laut territorial selebar 200 mil
  - C. Konsepsi negara kepulauan dan batas laut teritorial selebar 12 mil
  - D. Konsepsi negara maritime dengan batas laut territorial selebar 200 mil
  - E. Keutuhan wilayah NKRI
38. Pak Wisnu warga negara Indonesia yang berjasa bagi negara X dalam memajukan teknologi transportasi. Pemerintah negara X memberi status warga negara kehormatan kepada Pak Wisnu. Selama tinggal di negara X Pak Wisnu dianggap sebagai warga negara tetapi tidak perlu melaksanakan kewajiban warga negara, misalnya membayar pajak. Jika dikaitkan dengan syarat dan cara perolehan kewarganegaraan, Pak Wisnu memperoleh kewarganegaraan X melalui ....
- A. Adopsi
  - B. Kelahiran
  - C. Naturalisasi
  - D. Pengangkatan
  - E. Penganugerahan
39. Ketentuan tentang kemerdekaan beragama dijamin dalam UUD 1945 dan Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Pancasila dan UUD 1945 membuktikan bahwa ....
- A. Indonesia adalah negara agama
  - B. Indonesia mengakui adanya Tuhan
  - C. Indonesia menganut agama tertentu
  - D. Indonesia mewajibkan penduduk menyakini agama tertentu
  - E. Indonesia mewajibkan penduduk menyakini ajaran tertentu
40. Ada enam agama yang diakui secara sah oleh pemerintah. Penduduk Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk salah satu agama yang diyakini. Kebebasan ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu...
- A. Pasal 17 ayat (2)
  - B. Pasal 18 ayat (2)
  - C. Pasal 20 ayat (2)
  - D. Pasal 21 ayat (2)
  - E. Pasal 29 ayat (2)
41. Kita dapat menjumpai gedung kedaulatan besar Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura di Indonesia. Jika dipandang dari sisi negara asing, hal ini merupakan wujud...
- A. Upaya mencegah terjadi ancaman dari dalam
  - B. Pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia
  - C. Penghormatan terhadap bangsa Indonesia
  - D. Penghormatan terhadap bangsa lain
  - E. Kerjasama antar negara berdaulat
42. Kiyoshi seorang pelajar dari Jepang. Ia mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia. Ia harus tinggal di Indonesia selama masa studinya. Dapatkah Kiyoshi disebut penduduk Indonesia...
- A. Tidak, Kiyoshi adalah WNA
  - B. Tidak, Kiyoshi tidak menetap di Indonesia
  - C. Bisa, Kiyoshi harus berpindah kewarganegaraan
  - D. Bisa, Kiyoshi berdomisili di Indonesia sementara waktu
  - E. Bisa, Kiyoshi adalah wakil resmi dari Negara Jepang

43. Menjaga nama baik bangsa dan negara merupakan perwujudan pembelaan bangsa dan negara. Tindakan yang menunjukkan upaya menjaga nama baik bangsa dan negara adalah ....
- Menjaga warga negara asing
  - Selalu menggunakan produk luar negeri
  - Selalu mengadakan wisata ke luar negeri
  - Menerima pewarganegaraan dari negara asing
  - Menunjukkan sikap ramah terhadap warga negara asing
44. Orang tua Eli merupakan warga Indonesia yang menganut asas ius sanguinis, dan Eli dilahirkan di negara Paraguay yang menganut asas ius soli, maka dari kasus ini Eli memiliki status kewarganegaraan ....
- Apatride
  - Bipatride
  - Multipatride
  - Apatride dan Bipatride
  - Banyak kewarganegaraan
45. Perhatikan pernyataan di bawah ini !
- 1) Penduduk Indonesia
  - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara
  - 4) Sehat jasmani saja
  - 5) Memiliki integritas dan kepribadian yang baik
  - 6) Anggota partai politik
- Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan antara lain....
- 1), 2) dan 3)
  - 1), 3) dan 4)
  - 2), 3) dan 4)
  - 2), 3) dan 5)
  - 4), 5) dan 6)
46. Perhatikan isi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, "Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinism. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa bangsa". Penggalan pidato tersebut merupakan penjelasan salah satu rumusan lima sila menurut Bung Karno yaitu....
- Kesejahteraan sosial
  - Mufakat atau demokrasi
  - Kebangsaan Indonesia
  - Ketuhanan yang berkebudayaan
  - Internasionalisme atau perikemanusiaan
47. Pembentukan kementerian dilakukan oleh presiden paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah atau janji presiden dan jumlah kementerian paling banyak 34. Alasan yang bukan merupakan dasar pembentukan kementerian tersebut adalah....
- Effisiensi dan efektifitas
  - Perkembangan lingkungan global
  - Tantangan masyarakat ekonomi ASEAN
  - Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas
  - Kesinambungan dan keterpaduan pelaksanaan tugas
48. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam peraturan tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu....

- A. INPRES RI No. 12 Tahun 1968
- B. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998
- C. Tap MPR RI No. V/ MPR 2000
- D. Tap MPR RI No. VII / MPR/ 2001
- E. UU No. 12 Tahun 2011

49. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideology Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal itu ditegaskan dalam ....

- A. INPRES RI No. 12 Tahun 1968
- B. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998
- C. Tap MPR RI No. V/ MPR 2000
- D. Tap MPR RI No. VII / MPR/ 2001
- E. UU No. 12 Tahun 2011

50. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertical. Pilihan berikut yang berhubungan dengan pembagian kekuasaan secara vertical yaitu....

- A. Kekuasaan kehakiman
- B. Pemerintah pusat dan daerah
- C. Kekuasaan untuk menjalankan undang – undang
- D. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
- E. Kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan